

**Judul** : Anggaran Negara - Pilah Lagi Proyek Ambisius Tahun Depan  
**Tanggal** : Senin, 24 Juni 2024  
**Surat Kabar** : Hukum Online  
**Halaman** : 2

## ■ ANGGARAN NEGARA

# Pilah Lagi Proyek Ambisius Tahun Depan

JAKARTA. Pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta kembali memilah program ambisius yang akan bergulir tahun depan. Hal ini untuk menjaga kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, terutama defisit agar tak mendekati batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR pekan lalu menyepakati defisit anggaran dalam postur ekonomi makro 2025 sebesar 2,29% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Batas bawah kisaran tersebut lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar 2,45% PDB.

Sementara, rasio pendapatan negara disepakati di kisaran 12,30% hingga 13,36% PDB. Batas bawahnya naik dari usulan pemerintah yang sebesar 12,14% PDB. Sedangkan rasio belanja negara disepakati sesuai usulan pemerintah, yakni di kisaran 14,59% hingga 15,18% PDB.

Maria Gonzalez, *IMF Mission Chief* to Indonesia menilai, pemerintah Indonesia perlu menekan defisit anggaran

dan mencetak surplus keseimbangan primer. Sebab, hal tersebut akan mendukung pertumbuhan dan bauran kebijakan yang lebih seimbang sekaligus menjaga ruang kebijakan untuk merespons risiko negatif pada tahun 2024 dan 2025. "Indonesia perlu menghadapi dunia yang lebih rentan terhadap guncangan. Respons kebijakan tepat perlu disesuaikan dengan sifat dan durasi guncangan, dan didukung oleh peningkatan komunikasi," kata Maria, dalam laporan berjudul *2024 Article IV Mission to Indonesia*.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan, tantangan pengelolaan APBN ke depan sangat berat dengan beban program terlampaui besar. Sebut saja program makan siang atau makan bergizi gratis, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sementara, pemerintah dinilai tak optimal mengerek pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan. Oleh sebab itu, "Program-program ambisius seperti IKN, PSN, hingga makan siang gratis harus dipikirkan ulang," ucap



ANTARA FOTO/Galih Pradipta

**Pekan** lalu pemerintah dan Banggar DPR menyepakati defisit anggaran dalam postur ekonomi makro 2025 sebesar 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

Nailul, Minggu (23/6).

Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga melihat, dengan kondisi asumsi defisit fiskal APBN masih di bawah 3%, maka masih ada ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program populis kampanye Prabowo. Salah satunya makan bergizi gratis.

Namun ia mengingatkan, "Dalam pelaksanaan sebaiknya diberlakukan bertahap

bagi anak-anak Indonesia," kata dia, kemarin.

Tak hanya itu, saat nilai anggaran belanja sudah mendekati batas maksimal, maka aktivitas belanja dari beberapa program infrastruktur nasional juga bisa dikaji ulang. "Atau digeser aktivitasnya pada tahun berikutnya," tambah Myrdal.

Rashif Usman, Dendi Siswanto